

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia adalah salah satu indikator tingkat kemajuan suatu negara. Aspek harapan hidup, tingkat kesehatan serta pendidikan masyarakat dalam suatu negara merupakan aspek penting selain pendapatan domestik bruto dalam kemajuan suatu negara karena semua aspek tersebut merupakan indikator keberhasilan suatu negara dalam menyejahterakan masyarakatnya. Secara konsep, pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk mencapai hidup yang layak dengan meningkatkan daya beli dan kapasitas pasar. Ketika masyarakat telah memiliki keahlian maka produktivitas mereka akan lebih meningkat, di saat itulah masyarakat akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang efektif (Laisina, Masinambow, & Rompas, 2015).

Meningkatkan SDM suatu negara akan memperbesar kesempatan penduduk untuk ikut serta dalam proses pembangunan, karna peningkatan SDM akan meningkatkan kapasitas dasar penduduk dengan tujuan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas tinggi. Dengan adanya SDM yang berkualitas tinggi maka pembangunan akan lebih mudah karena mereka akan berperan aktif dalam pembangunan tersebut. Sebab itu, salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan nasional yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM suatu negara.

Indeks Pembangunan Manusia atau yang disebut sebagai Human Development Indeks (HDI) yang ditetapkan melalui United Nations Development Program (UNDP) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. IPM dapat

menggambarkan perkembangan manusia secara terukur dan representatif. IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang (UNDP, 1990).

IPM bertujuan untuk mengukur seberapa besar pencapaian pembangunan manusia yang berbasis dari sejumlah komponen-komponen dasar dari kualitas hidup manusia. Sebagai ukuran dari kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui tiga dimensi pendekatan dasar yaitu: kehidupan layak, pengetahuan dan umur panjang dan sehat (www.bps.go.id). unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi dan tidak dapat berdiri sendiri.

Konsep Indeks Pembangunan Manusia telah di anut di Indonesia seperti yang tertuang pada RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) (Harahap, 2011). Pencapaian tujuan pembangunan manusia di Indonesia difokuskan pada pemenuhan pendidikan, peningkatan kesehatan dan pemberantasan kemiskinan. Sejak tahun 2010 pertumbuhan nilai IPM di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tetapi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda hampir sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, pertumbuhan IPM di Indonesia jadi melambat. Hal ini disebabkan karena pandemi membuat pertumbuhan umur harapan hidup dan pendidikan melambat, juga menurunnya pengeluaran riil per kapita sebagai akibat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020-2022 ditingkat nasional maupun ditingkat regional khususnya di Provinsi Jawa Timur memiliki tren yang terus mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan karena adanya kualitas masyarakat pada segi pendidikan, kesehatan, serta daya beli yang tumbuh positif (BPS, 2021). Berikut informasi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dan di Provinsi Jawa Timur:



Sumber: data Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur terbilang masih rendah. Secara ranking nasional, Jawa Timur berada di urutan ke lima belas dari 32 provinsi. Dilihat dari rata-rata pada tahun 2020-2022 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur menempati diposisi terakhir dari lima provinsi lainnya di Pulau Jawa. Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga masih tertinggal dari rata-rata nasional sebesar 0,18. Indeks Pembangunan Manusia berada dalam kisaran angka 0 sampai 100. Dikatakan rendah jika kurang dari 60, sedang jika berada di angka 60 atau lebih dari 60 (dibawah 70),

tinggi jika berada di angka 70 atau lebih dari 70 (dibawah 80), dan dikatakan tinggi jika berada di angka 80 atau lebih dari 80 (Yektiningsih, 2018). Sehingga, semakin mendekati angka 100 maka mengindikasikan bahwa semakin baik Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah.

Perlambatan capaian IPM tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan, sedangkan komponen lainnya masih tetap tumbuh positif. Setelah intensitas Pandemi COVID-19 berangsur menurun terutama pada tahun 2022, geliat ekonomi memulih dan menyebabkan IPM Tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan IPM dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

IPM dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah dan salah satu petunjuk untuk melihat apakah pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Biasanya untuk pembangunan daerah, sumber dana yang digunakan berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah atau bisa disebut PAD merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No. 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapat daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin mandiri suatu daerah berarti daerah tersebut dapat

mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan baik untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Belanja Daerah terdiri atas belanja Modal dan Belanja Rutin. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah ialah Belanja Aset Tetap dan Belanja Aset Lainnya, seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana, dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil pengeluaran belanja modal dapat meningkatkan aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Upaya peningkatan IPM tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengalokasikan pendapatan daerah pada belanja modal untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan IPM seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Akuntansi berperan sebagai pengendali keuangan, praktik akuntansi pada sebuah Negara juga memiliki peran operasi, pelaporan, serta perencanaan. Yang semuanya memiliki unsur yang sama dengan indikator atau alat ukur keberhasilan pembangunan ekonomi Negara. Keuangan yang terkendali dengan baik merupakan salah satu faktor keberhasilan sebuah aktifitas baik pada perseorangan, perusahaan, bahkan Negara sekalipun. Dengan adanya pengendalian keuangan, Negara dapat memilih mana aktifitas keuangan yang layak untuk dilaksanakan, mana yang perlu dipertimbangkan atau direvisi

kembali, mana yang harus diberhentikan atau ditolak, dan mana yang harus tetap dipantau secara konsisten. Sehingga resiko kerugian secara ekonomi dan kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi juga dapat di minimalisir.

Penelitian sebelumnya Hastu Sarkoro (2016) dalam penelitian yang berjudul “Dana Alokasi Khusus dan pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012-2014)” dalam penelitiannya menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sesuai dengan semangat desentralisasi untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui kemandirian fiskal, pemerintah provinsi harus lebih fokus dalam upaya-upaya peningkatan PAD dengan menggali sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai belanja modal. Namun perlu dipertimbangkan bahwa upaya-upaya peningkatan PAD juga harus melihat sumber daya dan kemampuan daerah sehingga tidak terjadi trade off di mana keinginan yang menggebu untuk mendongkrak PAD justru menjadi disinsentif yang mematikan potensi ekonomi (investasi) daerah. Kondisi ini terjadi apabila pemerintah daerah membuat banyak kebijakan melalui peraturan daerah pajak dan retribusi tanpa melihat kemampuan daerah sehingga membuat masyarakat terbebani dan membuat pelaku usaha segan untuk melakukan investasi atau ekspansi usaha di daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka, dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur periode 2020-2022?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur periode 2020-2022?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur periode 2020-2022?

1.3 Tujuan

Berikut merupakan paparan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur periode 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Peneliti ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dibangku kuliah, terutama ilmu pengetahuan tentang perkoperasian sehingga mendapat pengalaman baru dalam berpikir dan juga dapat menambah daya analisis penulis.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atau hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja untuk dapat berjalan lebih baik.

3. Bagi Universitas

Peneliti ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah sehingga dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti yang akan datang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan Masukan dan informasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya.